

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Permasalahan kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga sebagai hak asasi manusia. Kesehatan sebagai hak asasi manusia terwujud melalui perlindungan secara hukum dan melalui kebijakan Pemerintah. Menjaga kesehatan adalah salah satu dari kebutuhan tubuh kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari akan tetapi kesehatan masih dipandang tidak terlalu penting. Adapun yang menjadi wabah penyakit yang sulit untuk disembuhkan saat ini sejak dilaporkan pertama kali pada tahun 1987 di Indonesia yaitu *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)*.¹ Penyakit HIV dan AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi perhatian paling penting bagi pemerintah.

Penyakit *Acquirea Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* adalah penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi dari virus *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang menyerang sel darah putih manusia.² Untuk meminimalisir wabah penyakit HIV dan AIDS perlu adanya langkah penanggulangan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 Tahun 2013 pasal 3 tentang penanggulangan HIV dan AIDS yang bertujuan untuk menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru, menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang disebabkan oleh AIDS,

¹ Abdul Jabbar A. Barissan (Tahun 2018) “*Impelementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanggulangan HIV/AIDS Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*”. (Vol. IV, No.2, Hal.541)

² Ibid. (Vol. IV, No.2, Hal.541)

meniadakan diskriminasi terhadap ODHA, dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat.³

Undang-undang RI nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial telah memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai “suatu tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagia setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia dengan pancasila”.⁴

Dalam langkah melakukan penanggulangan HIV dan AIDS pemerintah pusat sudah mengambil langkah serius sejak tahun 1994 dimana dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 36 tahun 1994 tentang pembentukan komisi penanggulang AIDS Nasional.⁵ Melewati beberapa evaluasi dengan adanya Komisi Penanggulanagan AIDS Nasional (KPAN) Pemerintah pusat melakukan terobosan guna merevetalisasi struktural KPAN melalui keputusan Presiden nomor 75 tahun 2006.⁶ Ketua komisi penanggulangan AIDS dijabat oleh Menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat diamana wakil I oleh Menteri kesehatan,wakil II Menteri Dalam Negeri, dan tim pelaksana oleh Sekretaris Komisi Penanggulangan

³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 3 Tentang Penanggulanaga HIV Dan AIDS

⁴ Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta

⁵ Keputusan Presiden Republik Inodnesia Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

AIDS Nasional.⁷ Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penanggulangan AIDS Nasional melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, badan internasional, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Semua peraturan yang telah ditetapkan tentang HIV dan AIDS tidak lepas dari peran Pemerintah dalam mengambil keputusan demi mewujudkan kebijakan yang mengangkat sebuah isu sesuai permasalahan masyarakat. Kebijakan menurut Parsons (2006:17) merupakan produk atau prinsip yang berkembang dengan istilah konotasi netral. Adapun teori proses kebijakan publik menurut Ripley (1985:49) menyebutkan ada beberapa proses kebijakan publik yang diawali dengan penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, evaluasi terhadap implementasi, dan kinerja dampak dan kebijakan baru.⁸

Melalui teori dari Ripley kita dapat mengetahui proses kebijakan pemerintah pusat sampai tingkatan daerah tentang kebijakan penanggulangan HIV. Melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1994 pada masa jabatan Presiden Soeharto dan di revelatisasi dengan keputusan Presiden nomor 75 tahun 2006 pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yuhiyono, KPA sendiri sudah dibentuk ke dalam bentuk komisi penanggulangan daerah yaitu Komisi Penanggulangan Provinsi dan Komisi Penanggulangan Kabupaten/Kota. Dalam sistem otonomi daerah saat ini banyak tindakan-tindakan yang memberikan dampak yang kurang baik terhadap Negara maupun masyarakat dan ada juga yang memanfaatkannya dengan baik. Pada pasal

⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Pasal 4 Tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

⁸ Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya:Putra Media Nusantara

18 UUD 1945 menjelaskan bahwasanya “Daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat daerah administrasi”. Pada dasarnya hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah Otonomi daerah.⁹

Adapun tugas Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) komisi penanggulangan AIDS tingkat Provinsi dan komisi penanggulangan AIDS tingkat Kabupaten/Kota yaitu merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan AIDS di wilayahnya sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu terletak di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan dalam memperhatikan adanya epidemi HIV dan AIDS.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu menjelaskan bahwasanya kini penderita HIV dan AIDS sudah mendekati pada 100 orang yang kebanyakan adalah ibu hamil, pelaut, pekerja seks komersial, pasien IMS dan pasien TBC.¹⁰ Adapun data perkembangan kasus HIV dan AIDS yang ditangani Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu pada tahun 2017 sebanyak 34 kasus, tahun 2018 sebanyak 25 kasus, dan 2019 sebanyak 16 kasus (Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit). Berdasarkan data tiga tahun terakhir kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Luwu mencapai jumlah 78 orang yang terkena epidemi HIV dan AIDS.

⁹ Sakinah Nadir.2013.*Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa : Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Hal.1,Vol.1, No.1

¹⁰ <https://koranseruya.com/waspada-penderita-hiv-aids-di-luwu-capai-100-orang-didominasi-laki-laki.html>. Diakses pada 22 Januari 2020

Kasus HIV dan AIDS yang ada di Kabupaten Luwu tidak mengenal usia, status sosial, maupun jenis kelamin yang tidak mudah diprediksi. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang tergolong rendah dalam memahami dampak dan penularan dari penyakit HIV dan AIDS. Penularan HIV dan AIDS sendiri berimplikasi tidak hanya pada masyarakat akan tetapi pada pendidikan, bidang sosial, politik, dan ekonomi sehingga menjadi penghambat pembangunan daerah.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan fokus penelitian pada Implementasi “**Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Dalam Menanggulangi Peningkatan Penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka penulis akan mengangkat pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu dalam menanggulangi peningkatan HIV dan AIDS?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah Luwu dalam menanggulangi peningkatan HIV dan AIDS?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian mempunyai tujuan yang ingin dicapai tidak lepas dari permasalahan yang sudah dirumuskan. Adapun tujuan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu dalam menanggulangi peningkatan HIV dan AIDS.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat kebijakan pemerintah Luwu dalam menanggulangi peningkatan HIV dan AIDS

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian diharapkan adanya manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai kontribusi karya ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Diharapkan menambah wawasan bagaimana mengetahui dan menanggapi beberapa kasus yang menghambat pengalokasian dana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengembang ilmu sosial dan ilmu politik sebagai hasil karya ilmiah diharapkan menambah referensi, wawasan dan informasi terutama dalam kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan menambah koleksi bacaan sehingga dapat digunakan sebagai sasaran acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi masyarakat Kabupaten Luwu khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi HIV dan AIDS khususnya program penanggulanagn dari instansi Dinas Kesehatan.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS dan berniat meneliti lebih lanjut serta bagi para aktivis, cendikiawan dan mereka yang menekuni serta berniat mengetahui problematika yang terjadi pada pengalokasian anggaran yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan studi dan mendapat gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
- 2) Memberi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diterima di bangku perkuliahan.

1.5 Defenisi Konseptual Dan Operasional

1. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual digunakan sebagai variable-variabel yang dijadikan pedoman dalam melakukan sebuah penelitian serta menafsirkan banyak teori dalam penelitian.

Adapun definisi konseptual menurut Imam Chourmain (2008:36) sebagai berikut :

“Defenisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas disusun secara terperinci terencana dengan matang, punya dasar teori yang kuat, latar belakang yang jelas, rencana yang baik, tujuan yang jelas dan manfaat yang baik”.¹¹

Konsep yang dipilih penulis untuk pengajuan riset skripsi dengan judul Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Dalam Menanggulangi Peningkatan Penyakit HIV dan AIDS (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu). Untuk memahami dan memudahkan dalam menentukan definisi konseptual, antara lain :

a. Kebijakan

Pengertian Kebijakan menurut Jones dalam Suharto & Edi (1991:46) yang mengemukakan bahwa “Kebijakan sering digunakan dan diperuntukkan makananya dengan tujuan program, keputusan, hukum, proposal, patokan, dan maksud besar tertentu”.¹²

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai keputusan dalam konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat mereka mematuhi keputusan tersebut. Dapat dinyatakan bahwasanya Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Pemerintah Daerah

¹¹ Prof. Dr. M.A.S Imam Chourmain, M,Ed.2008.*Acuan Normatif Penelitian Untuk Penulisan, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Al-Haramain Publishing House. Hal.36

¹² Suharto & Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta

Dalam istilah pada umumnya Pemerintah Daerah suatu wilayah yang terdiri dari beberapa kecamatan. Pemerintah Daerah dipimpin oleh Bupati dan dibantu oleh wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya. Pengertian Kabupaten/Pemerintah Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945”¹³

Pemerintah Daerah merupakan salah satu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan.

c. Penanggulangan HIV dan AIDS

Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) merupakan infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang menyerang kekebalan tubuh. Infeksi yang terjadi merupakan penyebab dari adanya virus HIV yang masuk melalui perantara darah dan semen darah. Untuk menekan peningkatan terjadinya epidemik HIV dan AIDS Pemerintah mengeluarkan tujuan kebijakan dalam penanggulangannya yang ada pada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Pasal 3 sebagai berikut :

“Menurunkan hingga meniadakan virus HIV baru, menurunkan hingga meniadakan kematian disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS, meniadakan diskriminasi ODHA, meningkatkan kualitas hidup

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 Tentang Pemerintah Daerah

ODHA, dan mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat”.¹⁴

Penanggulangan HIV dan AIDS merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting untuk dilaksanakan. Dengan memasukkan penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Peraturan Daerah merupakan langkah efektif agar semua peraturan yang sudah dikeluarkan dari Pemerintah Pusat bisa dijalankan juga di daerah-daerah terutama yang terpencil. Dengan adanya penanggulangan HIV dan AIDS dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan, juga menghindari kebiasaan yang dapat membuat Epidemii HIV dan AIDS berdampak pada lingkungannya.

2. Defenisi Operasional

Sugiyono (2015, hal.38) mengatakan bahwa defenisi operasional adalah “suatu atribut atau objek kegiatan yang memiliki berbagai variasi ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya”.¹⁵

Penulis melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Dalam Menanggulangi Peningkatan HIV dan AIDS (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu). Adapun beberapa variable-variabel yang didefinisikan secara operasional :

1. Untuk mengukur keberhasilan implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Dalam Menanggulangi Peningkatan penyakit HIV dan AIDS, ada 3 persepektif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Randall B. Repley and Grace A. Franklin (1986)¹⁶ :

¹⁴ Peraturan Kementrian Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

¹⁵ Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

¹⁶ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, hlm 51.

- a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku
 - b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
 - c. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam menanggulangi peningkatan HIV dan AIDS khususnya Dinas Kesehatan selaku pelaksana program penanggulangan HIV dan AIDS.

Adapun faktor pendukung dalam implemementasi kebijakan menurut George Edward III yang dikutip oleh Budi Winarno (2002:110)¹⁷:

- a. Komunikasi
- b. Sumber-sumber implementasi kebijakan.
- c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku pelaksana kebijakan.
- d. Struktur birokrasi.

Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan menurut Bambang Sunggono (1994:149-153)¹⁸:

- a. Isi Kebijakan yang tidak terperinci sesuai dengan tujuan.
- b. Informasi antar pemegang peran kebijakan yang tidak komunikatif.
- c. Dukungan Pelaksanaan kebijakan yang masih kurang.

¹⁷ Budi Winarno.2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo, hal. 110

¹⁸ Bambang Sunggono.1994. *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika Hal. 149-153

- d. Pembagian Potensi dimana pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tidak disesuaikan dengan pembagian tugas.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Dalam Menanggulangi Peningkatan Penyakit HIV dan AIDS (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu). Penelitian secara deksriptif adalah meneliti objek, kelompok manusia, kondisi dan sebuah sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Menurut Singarimbun (1989:4) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, prefrensi terhadap politik tertentu dan lain-lain”.¹⁹

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2016:26) “Subyek penelitian adalah berupa benda, orang atau tempat penelitian yang dipermasalahkan”.²⁰

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.
- b. Penderita HIV dan AIDS.
- c. Masyarakat umum.
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam penanganan HIV/AIDS.

3. Sumber Data

¹⁹ Singarimbun. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES

²⁰ Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Menurut Arikunto (1998:144) mengemukakan bahwa “sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh sedangkan menurut Sutopo (2006:56-57) “sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu seperti manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen”.²¹

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²² Sehingga data primer akan didapatkan melalui observasi dan wawancara yang langsung dilakukan oleh peneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Dalam Menanggulangi Peningkatan HIV dan AIDS.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2008) mengemukakan “Data sekunder adalah hasil pengolahan dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain”. Data sekunder adalah data yang bisa berupa buku, catata, bukti yang telah ada di (jurnal dan skripsi) atau arsip yang tidak dipublikasikan.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian ini dan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data sesuai fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Observasi

²¹ Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.

²² M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok materi metodeologi dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia

²³ Sugiyono, (2008).*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfabeta

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tidak terstruktur, observasi partisipan dan observasi non partisipan. Tujuan dilakukannya observasi adalah memahami aktivitas-aktivitas yang berlangsung, menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam suatu aktivitas, memahami dari suatu kejadian, serta mendeskripsikan tempat yang terjadi pada suatu aktivitas.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data secara wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab, mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan kepada narasumber, serta untuk melengkapi kebutuhan data yang tidak dapat diperoleh secara observasi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti telepon).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dan pendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, gambar, sketsa, foto, biografi, peraturan, dan kebiakan. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti menguji, menafsirkan dan juga dapat digunakan untuk meramal suatu kejadian.²⁴

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti guna memperoleh data

²⁴ Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

yang akurat. Sebagaimana yang ingin diketahui penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Dalam Menanggulangi Peningkatan HIV dan AIDS (Studi Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu), maka lokasi penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. JL. Topoka, No. 41, Belopa, Noling, Bupon, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

6. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar sehingga dihasilkan tema yang dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data. Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Data yang sudah diperoleh dan berkaitan dengan penelitian ini dijadikan satu.

b. Reduksi Data

Dalam tahap ini data yang telah diperoleh (data primer maupun data sekunder) yang berupa gambar, tabel-tabel dan hasil wawancara akan di klasifikasikan, diidentifikasi, dipilih dan dipilah sedemikian rupa sehingga data akan terbagi menjadi beberapa jenis dan diambil data-data yang paling relevan keberadaannya dan layak untuk dimasukkan kedalam tulisan.

c. Sajian Data

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis, menguraikan, memahami dan menggambarkan kembali data-data yang telah diperoleh dengan bahasa peneliti

agar lebih mudah dipahami. Pada tahapan ini data-data yang telah diperoleh telah tersusun ke dalam klasifikasi atau kelompok masing-masing. Kemudian dipaparkan atau dideskripsikan dan mencari korelasi atau hubungan dari kelompok-kelompok data sehingga nantinya diperoleh data baru yang merupakan hasil dari korelasi dan kompolasi dari kedua klasifikasi data sebelumnya.



